

Terjemahan Referensi

**Beberapa Perspektif tentang  
Keterkaitan antara Ras, Etnis, dsb:  
Perempuan Latin yang Berada  
Di Tepian/Marjinal**

Diterjemahkan oleh :

Nur Rachmi



Website : [www.ysik.org](http://www.ysik.org)

E-mail : [info@ysik.org](mailto:info@ysik.org)

## Daftar Isi

Judul .....	1
Daftar Isi .....	2
Catatan Terjemahan .....	3
Beberapa Perspektif tentang Keterkaitan antara Ras, Etnis, dsb:	
Perempuan Latin yang Berada di Tepian/Marjinal .....	4
Pendahuluan .....	4
I. Suatu Pengantar pada Pendekatan Baku-Kait .....	5
II. Pendekatan Komparatif dan Internasional .....	8
a. Badan-Badan Internasional .....	8
b. Mahkamah Agung Kanada .....	9
c. Amerika Serikat .....	10
III. Situasi Perempuan Latin .....	12
IV. Mengembangkan Suatu Pendekatan Baku-Kait dan Pragmatis .....	15
a. Metodologi Pelaporan dan Pengumpulan Informasi .....	15
b. Penyelesaian Hukum .....	16
c. Pendekatan-Pendekatan Baru terhadap Penyelesaian Masalah .....	16
Kesimpulan .....	18

## Catatan Terjemahan

Dalam setiap terjemahan dokumen mengenai *Intersectionality*, kata “baku-kait” adalah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) dalam diskusi-diskusinya untuk membicarakan kata *Intersectionality*.

Beberapa Perspektif tentang Keterkaitan antara Ras, Etnis, dsb:

## *Perempuan Latin yang Berada di Tepian/Marjinal*

*Julissa Reynoso\**

### Pendahuluan

Peninjauan terhadap hukum Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pendekatan yang paling umum digunakan terhadap klaim diskriminasi adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada satu dasar diskriminasi, seperti ras,<sup>1</sup> gender, cacat, or asal negara.<sup>2</sup> Artikel ini mengusulkan suatu pendekatan alternatif terhadap klaim diskriminasi – suatu analisis yang memperhitungkan realitas yang dialami oleh individu-individu dan konteks sosial diskriminasi tersebut. Saya menggunakan ‘pendekatan *baku-kaitity* (*baku-kait*)’ sebagai suatu kendaraan dan memfokuskan diri pada realitas yang dialami oleh perempuan-perempuan yang didefinisikan secara ras atau etnis – terutama *perempuan Latin*. Saya berpendapat bahwa penindasan yang saling terkait lahir dari gabungan banyak variabel, yang secara bersama-sama menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan bentuk diskriminasi manapun yang berdiri sendiri. Pendekatan *baku-kait* mengakui pengalaman unik seseorang berdasarkan perpaduan semua dasar yang terkait – gender, warna kulit, etnis, kelas, status keimigrasian, serta disabilitas. Argumen ini mengakui bahwa kerugian akan muncul dari bagaimana masyarakat memperlakukan individu-individu tertentu, bukan dari sifat tertentu yang ada dalam diri individu tersebut.

Lebih dari itu, saya mengajukan argumen bahwa resep hukum yang tradisional, bersifat *top-down* dan kaku sudah tidak lagi mencukupi untuk menyelesaikan persoalan penindasan

---

\* B.A., Harvard University; M.Phil., University of Cambridge; J.D., Columbia University School of Law. Ms. Reynoso bekerja sebagai asisten untuk anggota Kongres *the Honorable* Laura Taylor Swain dari *the Southern District of New York* dari tahun 2001 hingga 2003. Pada musim gugur 2003, ia bekerja sebagai *research fellow* untuk Proyek Inovasi Publik pada Columbia University School of Law.

Ms. Reynoso saat ini adalah seorang *associate* apada sebuah kantor pengacara di New York. Judul artikel ini terinspirasi dari sebuah tulisan Kimberlé Crenshaw. Lihat Kimberlé Crenshaw, *Mapping the Margins: Baku-kaitity, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, 43 Stan. L. Rev. 1241 (1991).

<sup>1</sup> Istilah “ras,” “rasisme,” dan “diskriminasi rasial” akan digunakan secara luas untuk menangkap segala bentuk diskriminasi berbasis kelompok, termasuk yang disebut pada pembedaan rasial formal, serta yang didasarkan pada warna kulit, etnis, asal negara, dan keturunan.

<sup>2</sup> Lihat pembahasan *infra* Bagian II.C.

yang saling terkait yang kompleks tersebut. Suatu skema aturan yang menekankan penyelesaian masalah yang bersifat kolaboratif, terutama ketika menangani diskriminasi di tempat kerja, dapat menciptakan ruang yang paling efektif untuk menghadapi klaim diskriminasi, sebab cakupan kerentanan yang saling kait yang sepenuhnya dapat dipahami paling baik dari bawah ke atas. Gagasannya adalah menciptakan standar-standar peradilan yang membutuhkan program-program dan undang-undang yang lebih pro-aktif anti-diskriminasi.

Dengan kerangka ini dalam pikiran, saya mengajukan argumen bahwa *perempuan Latin* memiliki kerentanan-kerentanan unik dan lebih besar kemungkinannya untuk mengalami banyak bentuk diskriminasi sebab mereka memiliki identitas jamak, yang pada gilirannya membentuk pengalaman diskriminasi mereka. Misalnya, seorang imigran *perempuan Latin* bisa jadi lebih rentan terhadap pelecehan seksual karena ia baru tiba di AS. Dengan kata lain, “karena pengalaman spesifik perempuan-perempuan yang didefinisikan secara ras seringkali tersamarkan di dalam kategori-kategori ras dan gender yang lebih luas, keseluruhan cakupan kerentanan yang saling terkait mereka tidak dapat diketahui dan di dalam analisis akhir harus dibangun dari bawah ke atas.”<sup>3</sup>

Artikel ini memiliki dua tujuan prinsip. Pertama, ia dibangun atas dasar pekerjaan yang mengakui kompleksitas bagaimana orang mengalami diskriminasi, menggambarkan suatu kerangka kerja bagi suatu pendekatan yang kontekstual dalam menganalisa berbagai klaim diskriminasi, dan mempersembahkan suatu model yang mungkin untuk penyelesaian masalah. Sebagai tambahan artikel ini menampilkan suatu narasi pengalaman *perempuan Latin* di dalam kerangka kerja yang saling terkait tersebut.

#### I. Suatu Pengantar pada Pendekatan Baku-kait

Konsep baku-kait telah didefinisikan sebagai penindasan yang lahir dari gabungan berbagai bentuk diskriminasi, yang secara bersama-sama menghasilkan sesuatu yang unik dan

---

<sup>3</sup> Kimberlé Crenshaw, *Gender-Related Aspects of Race Discrimination*, at 3, U.N. Doc. EGM/GRD/2000/WP.1 (2000).

berbeda dari bentuk diskriminasi manapun yang berdiri sendiri.<sup>4</sup> Memang, “Baku-kait adalah suatu konseptualisasi terhadap masalah yang berupaya menangkap akibat struktural maupun dinamis dari interaksi antara dua atau lebih sumbu subordinasi.”<sup>5</sup>

Untuk keperluan analisis saat ini, diasumsikan bahwa perempuan-perempuan yang didefinisikan secara ras atau etnis mengalami diskriminasi dengan cara yang sama sekali berbeda dari laki-laki yang didefinisikan secara ras atau etnis, atau bahkan perempuan sebagai suatu gender. Hal ini karena kelompok-kelompok seringkali mengalami bentuk-bentuk penerapan stereotipe yang sangat berbeda atas dasar gabungan ras, etnis, dan gender. Pendekatan baku-kait mengenali konsep ini.

Meskipun menerapkan pendekatan baku-kait pada klaim-klaim diskriminasi bisa jadi sangat sulit, metode ini memiliki banyak keuntungan. Baku-kait mengakui kompleksitas bagaimana orang mengalami diskriminasi, mengenali bahwa pengalaman diskriminasi bisa jadi unik, dan memperhitungkan konteks sosial dan historis dari kelompok yang didiskriminasi tersebut. Dan yang lebih penting lagi, ia memfokuskan diri pada respon masyarakat terhadap individu sebagai konsekuensi dari dasar-dasar diskriminasi, dan tidak menyuruh orang tersebut untuk masuk ke dalam kotak-kotak atau kategori-kategori yang kaku.<sup>6</sup>

Terlebih lagi, masyarakat dapat memperbaiki pemahamannya tentang dampak dari bentuk jamak diskriminasi ketika menangani klaim diskriminasi yang muncul di pengadilan. Dalam hal ini, pendekatan baku-kait adalah pendekatan yang ideal untuk menghadapi keberatan dan keluhan dari komisi-komisi hak asasi daerah dan nasional serta kantor-kantor Kesempatan Kerja Yang Sama (*Equal Employment Opportunity Commission offices*), sebab

---

<sup>4</sup> Pentingnya mengakui baku-kait dari banyak bentuk diskriminasi diakui pada Konferensi PPB Tentang rasisme, Diskriminasi rasial, Xenophobia dan Perilaku Intoleransi terkait lainnya di Durban, Afrika Selatan, pada tahun 2001. Menurut komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi manusia, “Anda semua tentu, saya tahu, menyadari adanya baku-kait dari banyak bentuk diskriminasi – bagaimana gender berpadu dengan ras, bagaimana orientasi seksual berpadu dengan ras, bagaimana kemiskinan berpadu dengan ras. Ini adalah dimensi yang memerlukan perhatian khusus yang sudah semestinya dalam Konferensi ini.” Mary Robinson, *Address of High Commissioner for Human Rights* (Aug. 28, 2001), bisa diunduh dari [http://www.un.org/WCAR/pressreleases/ngo\\_forum.htm](http://www.un.org/WCAR/pressreleases/ngo_forum.htm).

<sup>5</sup> Crenshaw, catatam *supra* 3, at 7.

<sup>6</sup> Lihat Ontario Human Rights Commission, *An Baku-kait Approach to Discrimination: Addressing Multiple Grounds in Human Rights Claims* (2001), bisa diunduh dari [http://www.ohrc.on.ca/english/consultations/baku-kaitity-discussion-paper\\_1.shtml](http://www.ohrc.on.ca/english/consultations/baku-kaitity-discussion-paper_1.shtml).

badan-badan tersebut biasanya mendefinisikan diskriminasi dengan memasukkan peristiwa diskriminasi yang terjadi atas dasar gender, ras, etnis, keturunan atau daerah asal, disabilitas, dan (di beberapa negara bagian) orientasi seksual.<sup>7</sup> Kegagalan mengadopsi pendekatan baku-kait dapat mejadi sangat berbahaya di dalam banyak kasus diskriminasi dan pelecehan seksual. Berbagai stereotipe yang timbul dari konsepsi khusus tentang ras dan gender seringkali menjadi sumber perlakuan diskriminatif. Kasus-kasus pelecehan seksual cenderung terus terjadi atas dasar bahwa ras, asal etnis, dan keturunan dari pelaku pelecehan dan korbannya tidaklah relevan. Meski demikian, seorang pelaku pelecehan bisa jadi memendam stereotipe tertentu tentang seksualitas perempuan atas dasar ras atau keturunannya yang pada akhirnya berujung pada perilaku diskriminatif. Di arena internasional, kekerasan genosida di Bosnia, Rwanda, Burundi, dan Kosovo menggambarkan bagaimana kekerasan berbasis etnis terhadap perempuan belum ditinggalkan.<sup>8</sup> Terlebih lagi, insiden-insiden perkosaan bermotif rasial di Bosnia dan Rwanda sudah menjadi norma yang konsisten dilakukan.<sup>9</sup>

Perempuan kulit warna khususnya seringkali menjadi obyek rasisme dan seksisme. Di Amerika Serikat, laki-laki yang dituduh memperkosa perempuan berkulit hitam dan Perempuan Latin jarang sekali diadili ataupun dihukum penjara.<sup>10</sup> Berbagai studi memperlihatkan bahwa identitas rasial korban memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan hasil seperti itu.<sup>11</sup> Para juri mungkin saja terpengaruh oleh propaganda seksual yang membuat mereka percaya bahwa perempuan ras lebih mungkin setuju untuk melakukan hubungan seks pada situasi-situasi yang menurut para juri tidak akan terjadi jika korbannya bukanlah dari ras minoritas.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat, e.g., 42 U.S.C. § 2000e-5 (2000).

<sup>8</sup> Lihat Jocelyn Campanaro, Catatan, *Women, War, and International Law: The Historical Treatment of Gender-Based War Crimes*, 89 Geo. L.J. 2557, 2569–70 (2001).

<sup>9</sup> Kimberlé Crenshaw, *The Baku-kaitity of Race and Gender Discrimination*, Nov. 2000, at 7, bisa diunduh dari <http://www.isiswomen.org/womenet/lists/apgr-list/archive/doc00009.doc>.

<sup>10</sup> *Id.* at 10.

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Id.*

Terlebih lagi, perempuan-perempuan yang didefinisikan secara ras atau etnis terkena dampak secara berlebihan dari pengalaman rasisme ketika, akibat segregasi pasar kerja dan kerugian ekonomi relatif, mereka menanggung akibat dari praktek-praktek perburuhan yang eksploitatif.<sup>13</sup> Perpaduan antara ras dan gender ini diperjelas lagi oleh pelanggaran hak ekonomi, yang secara berlebihan mempengaruhi perempuan yang menghadapi bentuk diskriminasi ganda ataupun jamak atas dasar ras, gender, imigrasi, dan ciri-ciri lain – seperti pada kasus-kasus yang menimpa kaum Perempuan Latin.<sup>14</sup> Perempuan-perempuan yang dihadapkan pada bentuk-bentuk diskriminasi jamak seringkali diberikan penyelesaian yang tidak sepenuhnya memperhitungkan luka yang diakibatkannya. Mencari tahu bagaimana cara terbaik menangani pelanggaran jamak dengan cara baku-kait sangat dibutuhkan untuk melestarikan hak-hak sipil, yang pada dirinya saling terkait dan tak terpisahkan. Hal ini memerlukan pembentukan suatu cara baru menganalisa penindasan dan menciptakan peran inovatif bagi pengadilan dan institusi-institusi pelengkap lainnya.

## II. Pendekatan Komparatif dan Internasional

### A. Badan-badan Internasional

Beberapa organisasi dan mekanisme hak asasi manusia internasional telah mengakui, baik secara eksplisit maupun sebagai acuan, bahwa ras dan gender seringkali saling terkait. Di tahun 1995 pada Konferensi Perempuan Dunia keempat, Platform untuk Aksi mengakui bahwa subordinasi gender dapat menjadi diperjelas dan diperkuat oleh rasisme,

---

<sup>13</sup> *Integrating Gender into the Third World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, U.N. Doc A/CONF.189/PC.1/17 (2000), dicetak ulang dalam Catherine Powell & Jennifer H. Lee, Comment, *Recognizing the Interdependence of Rights in the Antidiscrimination Context Through the World Conference Against Racism*, 34 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 235, 243 (2002).

<sup>14</sup> *Id.* at 243–44. Secara umum, orang-orang Latino lebih mungkin mengalami kesulitan ekonomi dibandingkan orang kulit putih. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, 21.4% orang Latin pada tahun 2002 hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan 7.8% orang kulit putih non-Latin. Orang-orang Latin mewakili 13.3% dari total jumlah penduduk Amerika Serikat namun merupakan 24.3% penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

United States Census Bureau, *The Hispanic Population in the United States: March 2002* 6 (2003), *bisa diunduh dari* <http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-545.pdf>. Memperhatikan perempuan-perempuan Latin sendiri, angkanya bahkan lebih dramatis lagi. Di New York City, misalnya, orang-orang Latin adalah kelompok minoritas terbesar pada tahun 2001, yakni 27% dari penduduk kota. Angka pengangguran di kalangan perempuan Latin adalah 7.9%, hampir dua kali lipat tingkat pengangguran perempuan kulit putih. Tingkat pengangguran laki-laki Latin adalah 6.6%. Angka pengangguran total penduduk New York City pada 2001 adalah 5.5%. Begitu pula halnya, pendapatan per kapita tahunan di antara rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga di New York adalah \$ 11,359 pada 2001. Di antara penduduk kulit putih New York, rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan memiliki pendapatan per kapita tahunan sebesar \$ 19,194. Francisco L. Rivera-Batiz, *The Socioeconomic Status of Hispanic New Yorkers: Current Trends and Future Prospects*, Jan. 2002, at 11–12, *bisa diunduh dari* [http://www.pewhispanic.org/site/docs/pdf/study\\_-\\_rivera-batiz-paper-final.pdf](http://www.pewhispanic.org/site/docs/pdf/study_-_rivera-batiz-paper-final.pdf).



*xenophobia*, dan pengalaman-pengalaman lain.<sup>15</sup> Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan lebih jauh menyatakan bahwa “penghapusan *apartheid*, segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, penjajahan dan dominasi asing, serta campur tangan urusan internal Negara Bagian adalah sesuatu yang esensial agar hak-hak perempuan dan laki-laki bisa dinikmati sepenuhnya.”<sup>16</sup> Beberapa perjanjian hak asasi manusia utama lainnya menyediakan perlindungan-perindungan anti-diskriminasi atas dasar ras dan gender. Jaminan seperti ini diartikulasikan antara lain di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia,<sup>17</sup> Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,<sup>18</sup> serta Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>19</sup>

### B. Mahkamah Agung Kanada

Meski sebagian besar negara-negara di dunia belum mengakui signifikansi dari baku-kait dalam menangani rasisme,<sup>20</sup> seksisme, dan perlakuan intoleran lainnya, peradilan Kanada telah membuat kemajuan beberapa tahun belakangan ini dalam mengembangkan dan menyarakan bentuk-bentuk praktis implementasinya. Contohnya, Mahkamah Agung Kanada baru-baru ini telah memasukkan komentar tentang dasar diskriminasi jamak dan saling terpadu. Dalam *Canada v. Mossop*, perbedaan pendapat tersebut mengakui bahwa “kategori-kategori diskriminasi mungkin saja saling tumpang tindih, dan bahwa individu-individu mungkin saja mengalami eksklusi historis atas dasar baik ras maupun gender, usia dan disabilitas, atau beberapa kombinasi lainnya.”<sup>21</sup>

<sup>15</sup> *Fourth World Conference on Women, Platform for Action*, at ¶ 46, U.N. Doc. A/Conf. 177/20 (1995), bisa diunduh dari <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm>.

<sup>16</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Dec. 18, 1979, 1249 U.N.T.S. 13.

<sup>17</sup> *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PBB. GAOR, 3d Sess., art. 2, U.N. Doc. A/217 (1948) (“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal negara atau daerah, kepemilikan, kelahiran, ataupun status lainnya.”).

<sup>18</sup> Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Dec. 19, 1966, art. 2, sec. 1, 999 U.N.T.S. 171 (“Setiap Negara yang menjadi bagian dari Perjanjian ini harus menghargai dan memastikan. . . hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini, tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin . . . ataupun status lainnya.”).

<sup>19</sup> Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Dec. 16, 1966, art. 2, 993 U.N.T.S. 3 (mematuhi bahwa hak-hak Perjanjian dijamin untuk semua orang “tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin . . . ataupun status lainnya”).

<sup>20</sup> Persoalan kerugian dan diskriminasi jamak seperti dialami oleh perempuan-perempuan minoritas belum diakui oleh hukum kasus pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau Komisi hak Asasi Manusia Lihat Komisi Hak Asasi Manusia Ontario, catatan *supra* 6, at 13–14.

<sup>21</sup> Sidang *Canada v. Mossop*, [1993] S.C.R. 554, 645.

Perbedaan pendapat tersebut lebih jauh mengakui bahwa:

Pada tataran praktis, dimana kedua bentuk diskriminasi dilarang, kita bisa mengabaikan kompleksitas dari interaksi tersebut, dan mencirikan diskriminasi sebagai jenis yang satu atau lainnya. Individu tersebut dilindungi dari diskriminasi dalam kedua peristiwa tersebut.

Meski demikian, walaupun diskriminasi berlapis mungkin bisa terjadi, tidak demikian dengan perlindungan berlapis. Ada situasi-situasi dimana seseorang mengalami diskriminasi dengan lebih dari satu dasar, namun dimana hanya satu bentuk diskriminasi yang dilarang. Ketika dihadapkan pada situasi demikian, kita harus berhati-hati untuk tidak menyebutkan sifat diskriminasinya, agar tidak menghilangkan peluang perlindungan bagi orang tersebut.<sup>22</sup>

Baru-baru ini, suara mayoritas dalam sidang *Law v. Canada* mengenali bahwa “oleh sebab itu, pada prinsipnya tidak ada alasan mengapa suatu klaim diskriminasi yang mengemukakan beberapa dasar yang terpadu tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang beranalogi dengan, atau merupakan sintesis dari, dasar-dasar yang tercantum di dalam [Piagam Hak-hak dan Kebebasan Kanada].”<sup>23</sup> Peradilan Kanada dengan demikian telah berevolusi dari kemauan untuk mengakui adanya baku-kait dalam suatu konteks yang terbatas ke adopsi pemahaman yang lebih luas tentang konsep tersebut dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah intoleransi.

### C. Amerika Serikat

Klaim baku-kait semakin banyak terlihat di Amerika Serikat, terutama dalam kasus-kasus diskriminasi kerja, bahkan meskipun pengadilan AS belum semaju pengadilan-pengadilan

---

<sup>22</sup> *Id.* at 645–46.

<sup>23</sup> Sidang *Law v. Canada*, [1999] S.C.R. 497, 554–55. Bagian 15 dari Karta Hak dan Kebebasan Kanada menjamin hak terhadap kesetaraan berdasarkan suatu daftar sejumlah dasar diskriminasi – yakni ras, asal negara atau etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, dan cacat fisik atau mental. Can. Const. (Constitution Act, 1982) pt. I (Canadian Charter of Rights and Freedoms).

Kanada atau perjanjian-perjanjian hak-hak asasi manusia dalam mengenali dan mengakui baku-kait dari ras dan gender. Bab VII dari Undang-undang Hak-hak Sipil 1964 melarang diskriminasi atas dasar berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, ras, dan asal negara.<sup>24</sup> Pengadilan-pengadilan AS telah mulai pelan-pelan menerima pandangan bahwa diskriminasi dapat terjadi atas dasar banyak faktor, namun banyak yang tetap kesulitan mengkonseptualisasikan klaim-klaim baku-kait.<sup>25</sup> Meskipun beberapa pengadilan telah mulai mengakui klaim diskriminasi atas dasar gabungan ras dan gender di bawah Bab VII, para komentator mengamati bahwa mereka belum mencapai konstruksi analitis yang sepenuhnya berkembang atau memadai untuk menguji pertimbangan-pertimbangan ganda ras dan gender.<sup>26</sup>

Diskusi-diskusi tentang teori baku-kait pertama kali terjadi dalam konteks pengalaman perempuan-perempuan kulit hitam.<sup>27</sup> Pada tahun 1987, misalnya, Pengadilan Banding *the Tenth Circuit Court of Appeals* menggunakan suatu analisis jenis-kelamin plus dalam sidang *Hicks v. Gates Rubber Company* dan menunda kasus tersebut untuk menentukan peran diskriminasi ras dalam suatu lingkungan yang secara seksual melecehkan.<sup>28</sup> Penggugat perempuan berkulit hitam pada pihak *Hicks* telah menjadi korban ejekan dan penghinaan rasial, yang oleh majikannya dibiarkan.<sup>29</sup> Pengadilan beralasan bahwa Bab VII membolehkan bukti diskriminasi ras untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang menyumbang pada lingkungan kerja yang tidak ramah dalam konteks suatu klaim pelecehan seksual.<sup>30</sup> Pengadilan *The Tenth Circuit* kemudian memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk mengevaluasi keberadaan lingkungan tidak ramah yang secara seksual melecehkan,

---

<sup>24</sup> 42 U.S.C. § 2000e-2(a)(1) (2000).

<sup>25</sup> Lihat Kathryn Abrams, *Title VII and the Complex Female Subject*, 92 Mich. L. Rev. 2479, 2483 (1994).

<sup>26</sup> *Id.* at 2481

<sup>27</sup> Lihat, misalnya, Kimberlé Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, 1989 U. Chi. Legal F. 139 (1989); Judith A. Winston, *Mirror, Mirror on the Wall: Title VII, Section 1981, dan the Intersection of Race and Gender in the Civil Rights Act of 1990*, 79 Cal. L. Rev. 775, 799 (1991).

<sup>28</sup> Sidang *Hicks v. Gates Rubber Co.*, 833 F.2d 1406, 1419 (10th Cir. 1987).

<sup>29</sup> *Id.* at 1409.

<sup>30</sup> *Id.* at 1417.

namun tidak memberi panduan tentang bobot relatif yang diterapkan pada penghinaan rasial.<sup>31</sup>

Di luar kasus *Hicks* pun, pengadilan memang enggan menerima teori tentang klaim gabungan sebab Bab VII tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seorang penggugat dapat membawa suatu tindakan atas dasar klaim jamak yang terjadi secara simultan.<sup>32</sup>

Sejarah pembahasan teks tersebut di parlemen menghilangkan kata “hanya” dan menguatkan argumen bahwa Kongres tidak menghambat kemungkinan adanya baku-kait.<sup>33</sup> Contohnya, dalam sidang *Jefferies v. Harris County Community Action Association*, pengadilan *the Fifth Circuit* mengenali bahwa diskriminasi terhadap perempuan berkulit warna memang berbeda dari jenis diskriminasi lain.<sup>34</sup> Pengadilan tersebut beralasan bahwa kata “atau” dalam teks Bab VII’s mengindikasikan maksud Kongres untuk melarang penggunaan diskriminasi atas dasar salah satu atau semua kategori yang dilindungi.<sup>35</sup> Dengan adanya preseden hukum ini, perempuan Latin di Amerika Serikat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memastikan bahwa narasi mereka didengar.

### III. Situasi Perempuan Latin

Perempuan Latin mengalami bentuk-bentuk diskriminasi yang unik atas dasar ciri-ciri yang dilekatkan pada perempuan Latin secara keseluruhan. Berbagai mitos dan kenyataan hidup orang-orang Latin di Amerika Serikat telah mempengaruhi perlakuan terhadap orang-orang Latin umumnya dan telah memperberat hilangnya penghargaan terhadap perempuan Latin khususnya. Perempuan Latin menjadi contoh yang sempurna bagaimana berbagai stereotipe saling terkait. Perempuan Latin, sebagai perempuan minoritas, menghadapi banyak bentuk subordinasi, “ditambah dengan ekspektasi institusional yang didasarkan

---

<sup>31</sup> *Id.* at 1413–17.

<sup>32</sup> Lihat 42 U.S.C. § 2000e-2(a)(1).

<sup>33</sup> Lihat 110 Cong. Rec. 2728 (1964); Sidang *Jefferies v. Harris County Cmty. Action Ass’n*, 615 F.2d 1025, 1032 (5th Cir. 1980).

<sup>34</sup> *Jefferies*, 615 F.2d at 1031–32.

<sup>35</sup> *Id.* at 1032.

pada konteks-konteks non-baku-kait yang tidak tepat.”<sup>36</sup> Seperti dijelaskan oleh salah satu komentator, hal ini “membentuk dan pada akhirnya membatasi kesempatan-kesempatan bagi adanya intervensi bermakna atas nama mereka.”<sup>37</sup>

Pengalaman perempuan Latin dengan kekerasan dalam rumahtangga menggambarkan bagaimana norma-norma perempuan Latin tertentu dapat mempengaruhi kemampuan rezim hukum dalam melindungi mereka. Contohnya, seorang pelaku kekerasan yang merupakan warga Amerika Serikat dapat memanipulasi dan mengendalikan istrinya yang seorang imigran dengan cara mengancam agar ia dideportasi jika ia mengeluhkan kekerasan yang dilakukannya dan mungkin memaksanya tinggal dengan janji kosong akan mengurus dokumen ijin tinggalnya.<sup>38</sup> Keterbatasan bahasa menjadi hambatan lain lagi. Program-program yang menjangkau masyarakat untuk korban-korban KDRT berbahasa Spanyol praktis tidak ada, dan sedikit sekali bahan yang disiapkan khusus untuk perempuan Latin ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol.<sup>39</sup> Terlebih lagi, perempuan Latin yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi seringkali harus mengandalkan para penyedia layanan publik. Akan tetapi, petugas kepolisian dan petugas lain yang berinteraksi dengan perempuan Latin yang dipukuli jarang sekali memberi respon yang sensitif budaya ataupun penterjemah bahasa Spanyol.<sup>40</sup> Memahami pengalaman historis yang dialami perempuan Latin juga sangatlah penting. Di Mexico, misalnya, sebuah Undang-undang yang disebut dengan nama *abandono de hogar* menghukum perempuan yang meninggalkan rumah mereka, bahkan saat mereka melarikan diri dari KDRT.<sup>41</sup> Perempuan-perempuan yang dituduh “meninggalkan rumah” seringkali kehilangan hak asuh atas anak-anaknya.<sup>42</sup> Beberapa perempuan Mexico yang bermigrasi ke Amerika Serikat dengan keliru percaya bahwa hukum yang sama berlaku pula di Amerika Serikat.<sup>43</sup>

---

<sup>36</sup> Crenshaw, catatan *supra* □, at 1251.

<sup>37</sup> *Id.*

<sup>38</sup> Lihat Michelle J. Anderson, Note, *A License to Abuse: The Impact of Conditional Status on Female Immigrants*, 102 Yale L.J. 1401, 1424 (1993).

<sup>39</sup> *Mujeres Latinas en Acción, Latinas and Domestic Violence*, di <http://www.mujereslatinassenaccion.org/Latinas%20&%20DV.html> (last visited Jan. 20, 2004).

<sup>40</sup> *Id.*

<sup>41</sup> *Id.* Lihat secara umum Julia Pérez Cervera, *Balance Sobre Violencia Doméstica* (2003), dapat diunduh dari <http://www.cladem.org/espanol/regionales/Violenciadegenero/Proyecto/mexico.doc>.

<sup>42</sup> *Mujeres Latinas en Acción*, catatan *supra* 39.

<sup>43</sup> *Id.*

Perempuan Latin juga lebih mungkin mengalami diskriminasi di tempat kerja. Imigran perempuan Latin, misalnya, lebih rentan hanya karena baru saja tiba di Amerika Serikat dan karena relatif belum bisa berbahasa Inggris dengan lancar.<sup>44</sup> Lebih jauh lagi, klaim yang melibatkan pelecehan dan diskriminasi seksual terhadap buruh imigran yang dilakukan oleh pengawas mereka seringkali diperburuk oleh etnis dan ciri bahasa, serta daerah asal dan status keimigrasian mereka.<sup>45</sup>

Untuk memerangi masalah-masalah tersebut, ada baiknya kita menentukan kasus-kasus atas dasar semua bentuk diskriminasi yang relevan, bahkan ketika bukti yang cukup bagi adanya kesalahan hanya satu dasar. Jika seorang perempuan imigran yang baru tiba menuduh telah terjadi pelecehan seksual, ada baiknya pula dipertimbangkan daerah asalnya, kewarganegaraannya, serta asal etnisnya, sehingga penyelidik – dan nantinya dewan penyidik – dapat menentukan apakah pelecehan tersebut terkait dengan kerentanan aktual atau perasaan perempuan itu saja sebagai imigran baru ataukah suatu persepsi seksualitasnya berdasarkan daerah asalnya.

Untuk menangani kasus-kasus kompleks ini secara efektif, pengadilan harus bergeser dari perspektif satu-dasar ke suatu analisis yang didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman suatu individu terjadi atas dasar identitas jamak yang dapat dikaitkan dengan lebih dari satu bentuk penindasan. Lebih jauh lagi, analisis ini membutuhkan pertimbangan faktor-faktor kontekstual, yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Hal ini akan membutuhkan dilakukannya suatu peninjauan dan pemeriksaan terhadap stereotipe-stereotipe diskriminatif yang dihadapi oleh perempuan Latin, yang akan mencakup sifat dan situasi individu yang menghadapi masalah, serta sejarah sosial, politis, dan hukum dari perlakuan terhadap orang tersebut di masyarakat. Suatu analisis kontekstual memandatkan suatu pendekatan yang pragmatis dan bersifat *bottom-up* dengan parameter-parameter yang jelas

---

<sup>44</sup> Lihat Maria L. Ontiveros, *To Help Those Most in Need: Undocumented Workers' Rights and Remedies Under Title VII*, 20 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 607, 618 (1993–94).

<sup>45</sup> Lihat *id.* at 620–21.

dan standar-standar yang memperhitungkan perpaduan yang kompleks dari perempuan-perempuan yang didefinisikan secara rasial dan etnis.

#### IV. Mengembangkan Suatu Pendekatan *Baku-kait* dan Pragmatis

Di tengah kompleksnya perpaduan status gender, ras, dan status-status lainnya, sangat diperlukan adanya perubahan dalam metodologi pelaporan, pengumpulan informasi, dan cara kerja sistem hukum Amerika Serikat serta institusi-institusi lainnya untuk dapat mengendalikan arus diskriminasi dan menentukan penyelesaian yang tepat.

##### A. Metodologi Pelaporan dan Pengumpulan Informasi

Badan-badan pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah harus memisahkan informasi, terutama data statistik yang dikumpulkan tentang karakteristik ras dan etnis penduduk tertentu menurut gendernya. Pengumpulan informasi haruslah termasuk fokus pada masalah-masalah yang terutama relevan bagi perempuan dari kelompok ras yang tidak menguntungkan, seperti perempuan Latin, yang bisa jadi berbeda dari masalah-masalah yang dihadapi perempuan pada umumnya – bahkan juga yang berasal dari komunitas dengan daerah geografis yang sama.

Karena juru bicara komunitas biasanya laki-laki, terutama di pemukiman-pemukiman orang-orang Latin, pengumpulan informasi harus mencari perspektif perempuan.<sup>46</sup> Untuk itu mungkin perlu menghadapi hambatan bahasa, ketidakmampuan perempuan untuk bicara bebas dengan petugas kantor pemerintah tentang potensi kekerasan, serta norma-norma masyarakat yang menekan perempuan untuk tidak bicara tentang pelanggaran atas hak-hak mereka.<sup>47</sup> Contohnya, fasilitas-fasilitas dan tempat-tempat harus ditemukan dimana perempuan bisa bicara secara langsung dengan petugas dalam kondisi yang dirancang untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perempuan. Anggota staf harus diberi pelatihan bagaimana menangani masalah-masalah yang terkait gender dan penerjemah perempuan harus pula tersedia.

---

<sup>46</sup> Lihat *Integrating Gender*, catatan *supra* 13.

<sup>47</sup> Lihat *id.*

### *B. Penyelesaian Hukum*

Bahkan jika pengadilan mengakui realitas diskriminasi berbasis dasar yang jamak, pengadilan harus mengambil langkah selanjutnya yakni mengembangkan penyelesaian yang tepat untuk menangani klaim-klaim tersebut. Karena tujuan dari penyelesaian adalah, sebagian, mengembalikan orang tersebut ke posisi yang mestinya ia raih seandainya diskriminasi tersebut tidak terjadi, evaluasi terhadap kerusakan yang tercipta pada seseorang akibat dari diskriminasi sangatlah penting untuk menciptakan penyelesaian yang tepat. Dengan begitu, akan ada situasi dimana kerentanan seorang individu – atas dasar bentuk-bentuk diskriminasi jamak – memerlukan pengakuan pada fase kerugian atas kerusakan seperti martabat yang terluka atau penderitaan mental.

Prinsip-prinsip tindakan afirmatif menyediakan panduan lebih jauh dalam menyelesaikan dan mencegah diskriminasi sistemik. Dengan mengakui bahwa aturan sosial dan hukum telah menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain, program-program tindak afirmatif berupaya untuk memulihkan keseimbangan dengan menargetkan orang-orang yang dirugikan – yaitu, mereka yang mengalami diskriminasi yang bersifat

*baku-kait* atau gabungan.

### *C. Pendekatan-pendekatan Baru Terhadap Penyelesaian Masalah*

Daripada mengikuti resep atau larangan hukum yang kaku atas tindakan diskriminasi yang jelas, dalam konteks pekerjaan, majikan seharusnya menerima upaya-upaya penyelesaian masalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab diskriminasi yang halus/samar. Majikan dapat menargetkan diskriminasi secara langsung, misalnya, dengan cara meningkatkan keragaman tempat kerja dan mengadopsi pendekatan-pendekatan kreatif untuk terciptanya lingkungan kerja yang ramah.

Meskipun undang-undang anti-diskriminasi tahun 1960s disahkan untuk memerangi tindakan-tindakan [diskriminatif] terhadap kelompok minoritas dan perempuan, diskriminasi



yang dihentikan oleh undang-undang tersebut rata-rata diskriminasi yang jelas, direncanakan, dan telah mapan.<sup>48</sup>

Meskipun langkah-langkah tersebut cukup efektif dalam memerangi jenis diskriminasi ras dan gender yang paling terang benderang, namun tidak cukup efektif dalam memerangi bentuk-bentuk diskriminasi yang lebih halus dan kontemporer – yang sering disebut dengan istilah “diskriminasi generasi kedua” – diskriminasi yang lahir dari penindasan berbaku-kait. Menurut Susan Sturm, [diskriminasi generasi kedua] bukan diakibatkan oleh upaya resmi yang sengaja memengaruhi, melainkan sebagai hasil sampingan dari interaksi sedang berjalan yang dibentuk oleh struktur-struktur pengambilan keputusan sehari-hari dan relasi-relasi di tempat kerja. Aturan tak tertulis yang membatasi (*glass ceiling*) tetap menjadi hambatan bagi perempuan dan orang-orang berkulit warna terutama karena pola-pola interaksi, norma-norma informal, jejaring, pelatihan, dan evaluasi . . .

Klaim-klaim tentang lingkungan kerja yang tidak ramah, praktek-praktek kerja yang secara subyektif pilih kasih, serta aturan tak tertulis yang membatasi (*glass ceilings*), dari sifatnya, memang kompleks. Kompleksitas tersebut terletak pada banyaknya konsepsi dan penyebab diskriminasi, sifat interaktif dan kontekstual dari luka/kerugian yang dialami, [dan] kaburnya batas antara perilaku yang sah dan yang salah ... Kompleksitas ini menolak definisi dan resolusi melalui perintah-perintah spesifik yang berlaku sama untuk semua (*across-the-board*), dan mekanisme penegakan aturan setelah-fakta-terungkap.<sup>49</sup>

Memang benar, melawan penindasan yang berbaku-kait membutuhkan keberanian untuk bergeser dari duka minimal dan prosedur edukasi ke kolaborasi partisipatif yang inovatif yang menyangkut semua bentuk diskriminasi.<sup>50</sup> Standar-standar peradilan harus diciptakan yang memandatkan kepada majikan untuk membentuk kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi yang konkrit dan prosedur-prosedur yang menjamin umpan balik (*feedback*)

---

<sup>48</sup> Lihat Susan Sturm, *Second Generation Employment Discrimination: A Structural Approach*, 101 Colum. L. Rev. 458, 466–67 (2001).

<sup>49</sup> *Id.* at 469.

<sup>50</sup> Lihat Archon Fung & Erik Olin Wright, *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance* 272–75 (2003).

dan partisipasi dari mereka paling rentan terhadap diskriminasi – dalam banyak kasus perempuan yang didefinisikan secara rasial atau etnis. Model ini hendak menangani masalah riil keterbatasan informasi, kemampuan bicara, dan antisipasi. Suatu standar peradilan harus merinci target-target spesifik dan langkah-langkah kinerja, sambil memberikan diskresi yang memadai bagi majikan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mencari solusi-solusi yang efektif. Tujuan adalah untuk memancing adanya pembahasan internal dan transparansi eksternal dengan cara memaksa majikan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati deskripsi yang jelas tentang praktek-praktek mereka.

Hal ini, pada saatnya, akan memaksa mereka untuk merefleksikan dan menjelaskan tindakan-tindakan mereka yang berpotensi diskriminatif.

## Kesimpulan

Banyaknya faktor yang membentuk identitas seseorang sesungguhnya dapat dipilah-pilah – begitu pula unsur-unsur diskriminasi yang terjadi karena seseorang berjenis kelamin perempuan kulit warna. Kasus yang dialami perempuan Latin memperlihatkan kebutuhan mendesak bagi parlemen, pengadilan, dan badan-badan pemerintahan untuk memasukkan tindakan-tindakan berbasis gender di dalam definisi-definisi diskriminasi ras dan asal negara.

Suatu metodologi yang memperhitungkan dimensi penuh pengalaman seseorang paling sesuai untuk melestarikan hak-hak dan memperbaiki yang salah. Analisis ini mengusulkan suatu proses penyelesaian masalah yang membutuhkan standar-standar hukum dan cara mengukur kemajuan yang merangsang terjadinya pembahasan internal berdasarkan konteks serta transparansi eksternal. Analisa ini mengajukan penyelesaian masalah yang membutuhkan sistem hukum, bersama-sama dengan institusi-institusi pelengkapannya, untuk memainkan peran yang inovatif dalam menangani diskriminasi yang berbaku-kait.